

## DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, M. I., dan Warjio. 2015. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah dalam Pencapaian Target Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. *Jurnal Administrasi Publik*. 6(2): 92-113.
- Afriniko. 2015. Politik Hukum Otonomi Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. *JOM Fakultas Hukum*. 2(1-15).
- Afrizal., Z. Mazaliza., A. Khudri. 2017. Analisis Prosedur Pengelolaan Keuangan Desa Sungai Pinang melalui Aplikasi SISKEUDES.
- Andriani, W., I. Rosita., H. Ihsan. 2015. Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dalam Menwujudkan *Good Governance* pada Politeknik Negeri Padang. *Jurnal Akuntansi & Manajemen*. 10(2).
- Anggara, S. 2014. *Kebijakan Publik*. Pustaka Setia. Bandung.
- Arcadia, D. C. 2018. Analisis Kesiapan Pemerintah Daerah dalam Menerapkan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) di Kabupaten Temanggung. *Skripsi*. Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN).
- Ardini, L. 2010. Pengaruh Kompetensi, Independensi, Akuntabilitas dan Motivasi terhadap Kualitas Audit. *Majalah Ekonomi*. 3.
- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. 2015. *Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan & Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa*. Juklak Bimkom Keuangan Desa. Jakarta.
- \_\_\_\_\_. 2016. *Modul Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES)*. Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah. Jakarta.
- \_\_\_\_\_. 2017. *Pengawasan Akuntabilitas Keuangan Desa (Sosialisasi Pengelolaan Dana Desa Bagi Pembina dan Pengawas Desa Tahun Anggakan 2017)*. Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah. Jakarta.
- \_\_\_\_\_. 2018. *SISKEUDES (Sistem Keuangan Desa): Manual Operasi Aplikasi SISKEUDES 2.0*. Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah. Jakarta.
- Badan Pusat Statistik. 2018. *Kecamatan Watulimo dalam Angka 2018*. Badan Pusat Statistik Kabupaten Trenggalek. Trenggalek.

- Bastian, I. 2014. *Lingkup Akuntansi Sektor Publik*. Modul Akuntansi Sektor Publik.
- D'Shouza, J. 2018. Self-Actualization. *The SAGE Encyclopedia of Lifespan Human Development*. 1-5.
- Desa Lestari.com. 2016. Wajib Pakai Aplikasi, yang Seharusnya Mudah jadi Merepotkan. <http://desalestari.com/2016/08/30/wajib-pakai-aplikasi-yang-seharusnya-mudah-jadi-merepotkan/>. 30 Agustus 2018 (18:30).
- Dixon., J. Ritchie dan J. Siwale. 2015. Microfinance : Accountability from The Grassroots. *Accounting Auditing and Accountability Journal*. 19 (3):405-427.
- Effendi, L.I. 2016. Implementasi Kebijakan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (Paten) di Kecamatan Palu Barat Kota Palu. *Jurnal Katalogis*. 4(11): 184-193.
- Ekawati, M. 2018. Pengaruh Pemberian Kompensasi terhadap Kinerja Guru Honorer di SMP Negeri 2 Sungguminasa Kabupaten Gowa. *Skripsi*. Program Studi Manajemen Pendidikan Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Alauddin. Makassar.
- Eko, S. 2017. Pengantar Lebih dari Sekedar Sedekah: Kontes, Makna, dan Relevansi ADD. FPPD: Yogyakarta. [www.forumdesa.org](http://www.forumdesa.org). 16 Desember 2018 (15:11).
- Endraswara, S. 2009. *Metode, Teori, Teknik Penelitian Kebudayaan (Ideologi, Epistemologi dan Aplikasi)*. Pustaka Widyatama. Sleman.
- Fahriana, R. 2018. Evaluasi Penerapan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) Berbasis Aplikasi dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus: Desa Mantaas, Kecamatan Labuan Amas Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan). *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*. 1(2).
- Fitrianti, R. 2018. Implementasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) di Desa Bumiratu Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu. *Skripsi*. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung. Bandar Lampung.
- Gayatri dan M.Y. Latrini. 2018. Efektifitas Penerapan SISKEUDES dan Kualitas Laporan Keuangan Dana Desa. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis*. 13 (2): 113-122.
- Ghony. M.D dan F. Almanshur. 2016. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Ar-Ruzz Media. Yogyakarta.

- Gufron. 2016. Hubungan antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa dalam Konsep Otonomi Pasca Reformasi di Indonesia. *Tesis*. Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta.
- Hadisubroto, Subino. 2009. *Pokok-Pokok Pengumpulan Data, Analisis Data, Penafsiran Data dan Rekomendasi Data Penelitian Kualitatif*. PPS IKIP Bandung. Bandung.
- Hariyoso, S. 2012. *Pembaharuan Birokrasi dan Kebijaksanaan Publik*. Peradaban. Yogyakarta.
- Hasniati. 2016. Model Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Analisis Publik*. 2(1): 15-29.
- Ilato, R. 2017. *Capacity Building Pemerintah Daerah Menuju Good Governance*. Ideas Publishing. Gorontalo.
- Indranata, I. 2009. *Pendekatan Kualitatif untuk Pengendalian Kualitas*. Universitas Indonesia. Jakarta.
- Indriasari, D dan E. Nahartyo. 2010. Pengaruh Kapasitas Sumberdaya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Pengendalian Intern Akuntansi Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Pemerintah Kota Palembang dan Kabupaten Ogan Ilir. *Simposium Nasional Akuntansi XI*. Pontianak.
- Iryanti, I. 2008. Implementasi Otonomi Desa menurut UU Nomor 32 Tahun 2004. (Studi Kasus Penerapan Otonomi Desa di Desa Sendayan dan Desa Kampung Panjang Kec. Kampar Utara Kabupaten Kampar Propinsi Riau). *Tesis*. Program Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta.
- Joni. 2015. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa di Desa Tanjung Ria Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang. *Tesis*. Program Pascasarjana Universitas Terbuka. Jakarta.
- Kabar Cirebon Online. 2018. Aplikasi SISKEUDES Cegah Penyimpangan Keuangan Desa. <http://www.kabar-cirebon.com/2018/09/aplikasi-siskeudes-cegah-penyimpangan-keuangan-desa/>. 18 Februari 2019 (11:20).
- Karmila., A.R. Tanjung., dan E. Darlis. 2012. Pengaruh Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pengendalian Intern terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Pemerintah Provinsi Riau). *Jurnal Sorot*. 9(1): 1-121.

- Kompas. 2017. Banyaknya Aturan Soal Dana Desa Dinilai Membingungkan. 5 September 2017. Jakarta.
- Kompas.com. 2015. Desa Dikelola Dua Kementerian. <https://nasional.kompas.com/read/2015/01/14/15430311/Desa.Dikelola.Dua.Kementerian>. 07 April 2019 (12:14).
- Kompas.com, 2018. Kabupaten Trenggalek Raih Top 99 Inovasi Pelayanan Publik 2018. <https://nasional.kompas.com/read/2018/01/14/15430311/Desa>. 13 Mei 2019 (23:47).
- Kushandajani. 2009. *Otonomi Desa Berbasis Modal Sosial dalam Perspektif Socio-Legal*. Cetakan Pertama. Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Diponegoro. Semarang.
- Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. 2017. *Akuntabilitas dan Good Governance*. Modul 1 dari 5 Modul Sosialisasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penerbit LAN. Jakarta.
- Local Solutions to Proverty. 2018. Penguatan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) FAQ. <https://localsolutionstopoverty.org/id/faq/indonesia-strengthening-village-financial-systems-faqs.html>. 20 Desember 2018 (09.23).
- Lombok Post.net. 2018. SDM Desa Hambat Penerapan SISKEUDES. <http://lombokpost.net/2018/05/05/sdm-desa-hambat-penerapan-siskeudes/>. 06 April 2019 (23:47).
- Malahika, J.M., H. Karamoy., R.J. Pusung. 2018. Penerapan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) pada Organisasi Pemerintahan Desa (Studi Kasus di Desa Suwaan Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara). *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*. 13(4).
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit Andi. Yogyakarta.
- . 2011. Perwujudan Transparansi dan Akutabilitas Publik melalui Akuntansi Sektor Publik: Suatu Sarana Good Governance. *Jurnal Akuntansi Pemerintah*. 2(1).
- Mulyadi, D. 2015. *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik: Konsep dan Aplikasi Proses Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*. Alfabeta, Bandung.

- Mustofa, A. I. 2012. Pengaruh Penyajian dan Aksesibilitas Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Kabupaten Pemalang. *Accounting Analysis Journal*.
- Nafi'ah, N.K. 2018. Implementasi dan Evaluasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) Provinsi di Jawa Timur. *Tesis*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya. Malang.
- Naimah. 2017. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas Keuangan Desa pada Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai. *Tesis*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sumatera Utara. Medan.
- Novirania. 2018. Implementasi Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) di Desa Bogorejo Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran. *Skripsi*. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung. Lampung.
- Pemerintah Kabupaten Pati. 2017. Hindari Penyimpangan, SISKEUDES Direncanakan *On Line*. *www.patikab.go.id*. 14 April 2019 (20:32).
- Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 3 Tahun 2018. *Pengelolaan Dana Desa*. 12 Februari 2018. Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2018 Nomor 5. Trenggalek.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018. *Pengelolaan Keuangan Desa*. 11 April 2018. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018. Jakarta.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015. *Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa*. 31 Desember 2015. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6. Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005. *Desa*. 30 Desember 2005. Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4587. Jakarta.
- Pramudya, N. 2018. Penerapan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) di Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan. *Skripsi*. Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN). Kalimantan Barat.
- Putri, R. A. 2018. Evaluasi Penggunaan Aplikasi SISKUDES dalam Upaya Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Desa (Studi pada Desa Jenetallasa Kec. Pallangga Kab. Gowa). *Skripsi*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin. Makassar.

- Rabb, A.D.A. 2016. Implementasi Kebijakan Dana Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93 Tahun 2015 pada Kecamatan Ganra Kabupaten Soppeng. *Akuntansi Peradaban*. 2 (1).
- Rahardjo, M. 2018. Paradigma Interpretif. *repository.uin-malang.ac.id/2437*. 17 Februari 2019 (10:51).
- Ramdhani, A dan M.A. Ramdhani. 2017. Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik. *Jurnal Publik*. 11(1):1-12.
- Rediyanto, T. 2018. Kesiapan Implementasi Sistem Keuangan Desa di Kabupaten Banyuwangi. *Tesis*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga. Surabaya.
- Sedarmayanti. 2011. *Good Governance (Kepemerintahan yang baik) dalam Rangka Otonomi Daerah*. Mandar Maju. Bandung.
- Siregar, K. 2015. Pengaruh Implementasi Kebijakan terhadap Kualitas Pelayanan Swasembada Beras di Kabupaten Simeulue. *Tesis*. Program Pascasarjana Universitas Terbuka. Jakarta.
- Soekanto, S. 2012. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Rajawali Pers. Jakarta.
- Sukri. 2016. Keniscayaan Konflik dalam Masyarakat Demokrasi. *Jurnal Politik Profetik*. 4 (2): 152-171.
- Sulina, G. A. T., M.A. Wahyuni., P.T. Kurniawan. 2017. Peranan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) terhadap Kinerja Pemerintahan Desa (Studi Kasus di Desa Kaba-Kaba, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan). *Jurnal Akuntansi*. 8(2).
- Tribun Kubu Raya. 2018. Tidak Ada Alasan Desa untuk Tidak Menggunakan SISKEUDES. <http://pontianak.tribunnews.com/2018/08/02/tidak-ada-alasan-desa-untuk-tidak-menggunakan-siskeudes>. 14 April 2019 (17:10).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 1999. *Pemerintahan Daerah*. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839. 7 Mei 1999. Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014. *Pemerintahan Daerah*. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587. 30 September 2014. Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2004. *Pemerintahan Daerah*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125. 15 Oktober 2004. Jakarta.

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014. *Desa*. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495. 15 Januari 2014. Jakarta.
- Wahab. S.A. 2010. *Analisis Kebijakan: dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Bumi Aksara. Jakarta.
- Wea, A. Y. T dan E. M. Hutagalung. 2018. Implementasi dan Efektivitas Sistem Keuangan Desa dalam Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintahan Desa di Kabupaten Nagekeo. *Skripsi*. Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN). Bukit Tinggi.
- Widyaningsih, A dan I. Pujirahayu. 2012. Pengaruh Pengetahuan Anggota Legislatif Daerah tentang Anggaran terhadap Pengawasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Akuntabilitas sebagai Variabel Moderating (Penelitian pada DPRD Kabupaten Sukabumi). *Media Riset Akuntansi*. 2(1): 18-31.
- Wiguna, I. M. D. D. D., G. A. Yuniarta., dan M. A. Prayudi. 2017. Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Pendidikan dan Pelatihan, serta Peran Pendamping Desa terhadap Efektifitas Penggunaan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) (Studi pada Desa Penerima Dana Desa di Kabupaten Buleleng). *E-Journal Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program SI*. 8(2): 1-10.
- Wijaya, H. 2018. *Analisis Data Kualitatif Ilmu Pendidikan Teologi*. Sekolah Tinggi Theologia Jaffrai. Sulawesi Selatan.
- Winarno, B. 2012. *Kebijakan Publik Teori, Proses dan Studi Kasus*. Media Presindo. Yogyakarta.
- Wisakti, D. 2010. Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa di Wilayah Kecamatan Geyer Kabupaten Grobogan. *Tesis*. Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro. Semarang.
- Wisesa, H. G., Z. Hidayat., N. Widowati. 2012. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Semarang (Solusi Pengurangan Timbunan Sampah di TPA Jati Barang). *Jurnal Publik*. 1(1): 1-8.